

Jokowi Minta Dukungan Puteri Indonesia dan Miss Universe untuk KTT G20

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Puteri Indonesia 2022, Laksmi Shari Suardana, Puteri Indonesia Lingkungan 2022 Cindy May McGuire, dan Puteri Indonesia Pariwisata 2022 Adinda Chresheilla, di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (30/5) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta para Puteri Indonesia 2022 untuk ikut terlibat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada November tahun ini.

"Bapak Presiden juga tadi menyampaikan bahwa untuk semua program-program G20 khususnya pada puncaknya nanti Puteri Indonesia untuk dilibatkan dan juga para finalis lainnya yang ada di provinsi masing-masing," ujar Ketua Dewan Penasihat Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani, dalam keterangannya usai pertemuan.

Menurut Putri Kus Wisnu Wardani, para Puteri Indonesia 2022 memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing yang sesuai dengan topik yang diangkat dalam KTT G20 tahun 2022. Antara lain soal perubahan iklim, digitalisasi, hingga kebangkitan pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, Puteri Indonesia 2022 Laksmi Shari Suardana menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam KTT G20 dan membuat bangga bangsa serta negara Indonesia.

"Saya ingin mengucapkan bahwa kita Puteri Indonesia 2022 sangat siap

untuk bertugas dan membuat negara kita bangga. Bapak Jokowi tadi menyampaikan bahwa kita ditugaskan untuk mempromosikan negara kita terutama G20 dan kita siap sekali dan ingin membuat negara kita bangga," ujar Laksmi.

Senada, Puteri Indonesia Lingkungan 2022 Cindy May McGuire, turut menyampaikan komitmennya untuk ikut serta dalam KTT G20, khususnya di bidang arsitektur kesehatan global.

"Saya akan memfokuskan kepada sektor prioritas yaitu global health architecture dan semoga semua program-programnya itu akan terlaksanakan dengan baik," tutur Cindy.

Selain Puteri Indonesia 2022, Presiden Jokowi juga menerima kunjungan Miss Universe 2021 Harnaaz Kaur Sandhu. Melalui pertemuan tersebut, Harnaaz menyampaikan apresiasi terhadap negara Indonesia dan hubungan baik yang terjalin antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

"Saya sangat senang mengetahui hubungan (baik) Presiden Jokowi dengan PM Modi. Saya sangat senang berada di sini, di negara yang indah ini, untuk melihat keindahan negara ini dan belajar lebih banyak tentang negara ini. Saya akan segera kembali ke sini," ucap Harnaaz.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

● me

2 Polhukam

FOTO/ANT



JAMAAH CALON HAJI TIBA DI ASRAMA HAJI LAMPUNG
Jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Lampung bersiap memasuki ruang Asrama Haji Lampung, Lampung, Minggu (5/6). Sebanyak 393 jamaah calon haji asal Bandar Lampung tiba di Asrama Haji Lampung dan akan diterbangkan hari ini, Senin (6/6).

Partai Demokrat-Nasdem-PKS Berpeluang Membentuk Poros Ketiga di Pilpres 2024

KIB mendorong terbentuknya tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Poros-poros itu diharapkan mengusung pasangan capres-cawapres.

JAKARTA (IM) - Partai politik dinilai berpotensi untuk membentuk tiga poros koalisi untuk mengusung calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memperkirakan bakal ada tiga poros koalisi dalam Pemilu 2024 mendatang. Peta koalisi yang dimungkinkan terjadi pada Pilpres 2024 mendatang adalah PDI Perjuangan-Gerindra, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yaitu Golkar-PAN-PPP, dan koalisi yang dibentuk Demokrat-Nasdem-PKS.

"Jika ini terjadi, maka PKB menjadi penyeimbang

dan kemungkinan besar akan masuk dalam KIB," kata Dedi kepada wartawan, Minggu (5/6).

PKB kemungkinan besar akan bergabung dengan KIB di mana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai penentu sikap partai.

Namun menurut Dedi, PKB memang cenderung lebih dekat untuk bergabung dengan KIB lantaran kemungkinan koalisi PDI-P Gerindra tidak dapat dimasukinya.

"Karena kalau ke PDI-P kesulitan, mengingat di PDI-P-Gerindra, sudah memiliki tokoh potensial sekaligus PDI-P memiliki kedekatan dengan PBNU yang selama ini berkonflik secara elite dengan Muhaimin," jelasnya.

Untuk itu, Dedi melihat kans PKB cenderung ke KIB. Namun, masuknya PKB ke KIB akan menjadi persaingan berat bagi PKB mengusung Muhaimin. Selain itu, faktor 'berebut suara' dengan PPP juga membuat PKB harus sedikit beradaptasi jika kelak masuk KIB.

Poros ketiga diperkirakan terdiri dari Partai Demokrat-Nasdem-PKS. Koalisi ini, dimungkinkan terjadi jika ketiga partai itu juga sudah memiliki tokoh yang punya kedekatan karakter.

Hanya saja, terkait siapa kandidat yang akan diusung, Dedi melihat poros ini tidak mencalonkan masing-masing kader partainya.

"Karena Nasdem sendiri tidak punya tokoh yang potensial, kemudian PKS juga tidak memiliki tokoh potensial," katanya.

Dedi menilai, hanya satu orang tokoh yaitu dari Demokrat, Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono

(AHY) yang berpotensi dari internal koalisi.

"Itu pun (AHY) hanya sebatas sebagai cawapres. Maka, tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan, atau mungkin tokoh-tokoh populer lain termasuk Ganjar Pranowo itu punya peluang di poros ketiga ini," jelas Dedi.

Poros ketiga yang mengusung tokoh luar juga bisa saja tidak akan terjadi. Hal ini mengingat KIB juga belum menyatakan sikap akan mendukung calon dari internal atau dari eksternal. Peluang tokoh-tokoh tersebut diusung poros ketiga jika KIB memang murni dibentuk untuk mengusung kader-kadernya sendiri.

"Tetapi kalau KIB ternyata

dibentuk sebagai upaya untuk mendorong Ganjar, karena ada peluang. Maka lain soal," tutup Dedi.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa KIB mendorong terbentuknya tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Poros-poros itu diharapkan mengusung masing-masing pasangan capres-cawapres. Adapun KIB ini masih dihipotesis oleh Golkar-PAN-PPP.

Zulkifli atau akrab disapa Zulhas itu mengatakan, harapan terbentuknya tiga poros berkaca dari pengalaman pilpres tahun-tahun sebelumnya yang salah satunya menyebabkan polarisasi di masyarakat.

● han

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Masuk Radar KIB Jadi Capres 2024

JAKARTA (IM) - Nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masuk ke dalam radar calon eksternal yang berpotensi diusung koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, saat menyampaikan sambutan di acara silaturahmi nasional (Silatnas) KIB. Dia bercerita, banyak pihak yang berspekulasi pembentukan koalisi ini untuk dijadikan perahu bagi calon tertentu.

"Jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Ganjar. Oh, bisa juga, ada lagi yang tanya, Pak, jangan-jangan ini koalisi untuk Pak Anies? Bisa juga," kata pria yang akrab disapa Zulhas pada acara yang digelar di kawasan

Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6).

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, KIB membuka peluang terhadap semua calon yang muncul di permukaan publik. Nantinya, nama-nama itu akan dibahas di internal koalisi. "Kok, semua bisa? Sebab, kami memang belum membicarakan soal capres dan cawapres," ujarnya.

Tak hanya tokoh-tokoh eksternal, Zulhas mengatakan KIB juga membuka peluang yang sama untuk menempatkan kader-kader terbaik dari tiga parpol yang gabung dalam KIB untuk maju di panggung demokrasi tersebut.

"Katanya Pak Airlangga mau jadi capres, saya jawab layak pantas. Ketua partai pemenang nomor dua Pak Airlangga layak jadi capres, Pak Suharto Ketua Umum PPP ditanya, layak juga jadi capres atau cawapres," katanya. ● han

Anggota DPR Minta Tarif Naik Candi Borobudur Rp750 Ribu Dievaluasi

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik rencana pemerintah yang akan menaikkan harga tiket menaiki Candi Borobudur dari Rp50 ribu menjadi Rp750 ribu. Huda pun meminta keputusan itu dievaluasi.

"Saya pada posisi tidak setuju. Saya tidak setuju dan kalau sudah diputuskan saya kira perlu dilakukan evaluasi," kata Huda saat dihubungi, Minggu (5/6).

Huda kemudian memberikan sejumlah catatan. Huda menyinggung alasan Luhut yang menaikkan tarif tiket untuk menjaga kekayaan sejarah dan budaya Nusantara.

Menurutnya, apabila alasannya untuk menjaga kekayaan sejarah dan budaya Nusantara, seperti yang diungkapkan Luhut Panjaitan, lalu tekit dinaikkan, semestinya hal itu menjadi opsi terakhir.

Huda menilai kenaikan tarif itu berisiko menjauhkan pemahaman masyarakat terkait pengetahuan situs budaya dan sejarah. Huda mendorong Candi Borobudur tetap menjadi destinasi yang dapat diakses sebanyak-banyaknya oleh wisatawan kita.

Huda lantas meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), perwakilan pemerintah yang menjadi mitra kerja

Komisi X DPR, mengambil inisiatif terkait kebijakan itu. Dia mengatakan persoalan ini akan dibawa menjadi bahasan dalam rapat kerja DPR bersama Kemenparekraf.

"Ya kita minta supaya ada diskusi dulu. Ada semacam konsultasi publik dulu dan saya kira Kemenparekraf bisa mengambil inisiatif," katanya.

Senada, anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) Putu Supadma Rudana menilai kebijakan soal harga tiket tersebut belum tepat lantaran daya beli masyarakat masih rendah saat ini. Dia mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

"Pemerintah lebih baik mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan bijaksana, bukan menjauhkan masyarakat dari warisan luhur budaya kita," imbuhnya.

Putu mengingatkan jangan sampai kebijakan tarif baru tiket menaiki Candi Borobudur justru malah merugikan masyarakat sekitar khususnya para pelaku UMKM.

"Jangan sampai kenaikan tiket ini justru memberi dampak kerugian kepada masyarakat sekitar yang bergantung kehidupannya kepada kunjungan wisatawan, khususnya para pelaku UMKM," ujarnya. ● han



FOTO:ANT

PERPUSTAKAAN KELILING KEMBALI BEROPERASI

Warga memilih buku bacaan koleksi mobil perpustakaan keliling di Taman Hijau, Kediri, Jawa Timur, Minggu (5/6). Mobil perpustakaan keliling milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat tersebut kembali beroperasi di tempat umum seiring mulai menurunnya COVID-19.

Erick Thohir Hadiri pada Acara Halal Bihalal PAN Bukan untuk 2024

JAKARTA (IM) - Menteri BUMN Erick Thohir hadir di acara bertajuk 'Silaturahmi Akbar dan Pembekalan Bacaleg DPR RI PAN' di kantor DPP PAN, Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi buka suara terkait kehadiran Erick tersebut. Ia mengatakan Erick memang diundang di acara silaturahmi penangan pemilu bacaleg PAN.

Viva menyebut munculnya Erick di acara itu bukan untuk Pilpres 2024.

"Erick Thohir kami undang di acara silaturahmi kemenangan Pemilu bakal calon legislatif PAN. Bukan untuk 2024, tetapi bersilaturahmi di keluarga besarnya sendiri, yaitu Partai Amanat Nasional," kata Viva kepada wartawan, Minggu (5/6).

Kehadiran Erick menemui sang ketum, Zulkifli Hasan (Zulhas), untuk membicarakan perspektif visi ekonomi Indonesia ke depan. Selama ini Erick dan Zulhas memiliki hubungan yang baik.

"Tujuannya untuk sambung rasa dan memberikan perspektif visi ekonomi Indonesia ke depan. Di samping itu, Mas Erick Thohir dan Bang Zulkifli Hasan itu sama-sama dari satu kampung. Hubungan seperti saudara, adik dan kakak," ujarnya.

Selama ini PAN menganggap Erick menjadi bagian dari keluarga. Adapun acara tersebut dihadiri oleh seluruh Ketua DPW PAN.

"Hadir seluruh Ketua DPW PAN se-Indonesia, Ketua Penasehat DPP PAN,

Bang Hatta Rajasa," kata Viva.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir hadir ke acara yang digelar PAN, Minggu (5/6). Berdasarkan pantauan di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/6), terlihat Erick Thohir mengenakan baju batik berwarna cokelat.

Erick tiba sekitar pukul 12.39 WIB dan berjalan ke lantai 2 ditemani Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) DPP PAN Hatta Rajasa.

Tak lama, Erick terlihat kembali turun ke lantai dasar pada pukul 13.30 WIB. Erick didampingi Zulhas dan Hatta Rajasa.

Erick mengatakan kedatangannya untuk menghadiri undangan dan bertukar pikiran mengenai permasalahan ekonomi.

"Alhamdulillah menghadiri undangan dari PAN Pak Zul untuk tukar pikiran mengenai ekonomi ke depan dengan situasi ekonomi sekarang ini benar-benar kita mendapat tekanan, dan tadi disampaikan pemerintah memastikan hadir bagaimana subsidi daripada BBM teraja dan tadi saya sampaikan kondisi BUMN sehat ya," kata Erick.

"Tapi memang tentu beberapa BUMN harus kita perbaiki dan Pak Zul menekankan tadi bersih-bersih BUMN harus terus ditegaskan. Karena penting sekali kita bersama-sama menjaga kepercayaan publik bersama Pak Zul juga menekankan penting sekali masyarakat menjadi prioritas," ujarnya. ● me

RKUHP Akui Hukum Adat dengan Sanksi Pidana Kewajiban Adat

JAKARTA (IM) - Salah satu ciri Rancangan KUHP (RKUHP) adalah pengakuan atas hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia. Hukum adat ini tidak ada dalam KUHP peninggalan penjajah Belanda yang MASIH berlaku hingga saat ini.

Hukum adat diatur sendiri dalam Bab XXXIII tentang Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang dalam masyarakat. Disebutkan bila asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.

"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana," demikian bunyi Pasal 597 ayat 1 yang dikutip dari RKUHP sebagaimana disosialisasikan pemerintah,

Minggu (5/6).

"Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 huruf f," ujar-nya.

Dijelaskan lebih lanjut, yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana" adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

"Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana," demikian bunyi penjelasan RKUHP.

Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari peraturan daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat.

Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam undang-undang ini.

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'berlaku dalam tempat hukum itu hidup' adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandungkan pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh undang-undang ini," urai Penjelasan RKUHP itu. ● han



FOTO:ANT

PULAU DUA NOMINASI API AWARD 2022

Wisawatan bermain air di pantai objek wisata Pulau Dua, Bakongan Timur, Aceh Selatan, Aceh, Minggu (5/6). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan objek wisata Pulau Dua sebagai salah satu nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) Award tahun 2022 pada kategori destinasi kreatif.